

PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNA YATRA

Novidayanti Ulfiansyah

ulfiansyahnovidayanti@gmail.com

Danny Wibowo

dannywibowo@stiesia.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the credit granting process to the customers at PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra, and to find out the effectiveness of the implementation of the Accounting Information System (SIA) in supporting those activities. The research applies qualitatively with a case-study approach at PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra. The result indicates that the credit granting process at PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra is based on the 5C principle, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy. Besides, it also considers SIA elements, including human resources, procedure, financial statements, and documents which are used to minimize risks for bad credit. Furthermore, the implementation of SIA facilitates to ease recording, processing, and reporting financial data so that fasten the process of making decision related to credit granting. Therefore, job rotation needs to be applied to prevent fraud potency and improve SIA quality. As a consequence, the performance will be accurate, optimal, and run well without any obstacle.

Keywords: Bank Perkreditan Rakyat, accounting information system, and credit granting.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan proses pemberian kredit kepada nasabah di PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra, sekaligus melihat efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam mendukung aktivitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus di PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra telah mengacu pada prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy* serta unsur-unsur SIA yang berupa Sumber Daya Manusia (SDM), prosedur, laporan keuangan, dan dokumen yang berfungsi untuk meminimalkan risiko terjadinya kredit macet. Penerapan SIA membantu mempermudah pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan data keuangan sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan terkait pemberian kredit. Penerapan perputaran jabatan (job rotation) perlu dilakukan untuk mencegah potensi kecurangan, serta peningkatan kualitas SIA agar kinerja menjadi lebih akurat, optimal, dan berjalan dengan baik tanpa hambatan.

Kata Kunci: Bank Perkreditan Rakyat, Sistem Informasi Akuntansi, Pemberian Kredit.

PENDAHULUAN

Dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara, sektor perbankan memainkan peran penting. Oleh sebab itu, dana harus dikelola bank dengan baik, memberikan pinjaman, dan memberikan layanan perbankan lainnya kepada Masyarakat. Operasional bank juga harus berjalan lancar agar tujuan perbankan dapat tercapai. Tujuan bank adalah untuk membantu perekonomian masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Bank menyediakan layanan guna memenuhi kebutuhan dan harapan nasabah (debitur). Untuk mengurangi risiko di masa depan, bank harus meninjau calon nasabah secara menyeluruh, baik secara internal maupun

eksternal, sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Opsi kredit tersedia dalam bentuk kredit bagi mereka yang membutuhkan dana tambahan atau mereka yang membutuhkan keuangan untuk perusahaan pendanaan atau kebutuhan anggaran mereka. Kredit adalah Ketika pemberi pinjaman memberikan barang, jasa, atau uang kepada peminjam dengan keyakinan bahwa peminjam akan membayar kembali pemberi kredit selama jangka waktu yang disepakati bersama.

Prinsip utama pemberian kredit kepada nasabah (debitur) adalah berdasarkan pada kelayakan dan kemampuan nasabah (debitur). Ini didasarkan pada kepribadian debitur, pengalaman bisnisnya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian dan peraturan pemerintah dalam sektor tersebut, jaminan yang diberikan debitur, dan kondisi ekonomi bank itu sendiri. Namun, bank akan melakukan analisis kredit sebelum memberikan kredit untuk memastikan bahwa debitur dapat dipercaya, dengan melihat *background* debitur dan peluang usahanya. Hal ini dapat meyakinkan bank bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Bank tidak akan memberikan kredit tanpa melakukan analisis sebelumnya. Dikarenakan debitur dalam kasus ini dapat dengan mudah memberikan informasi yang salah, yang membuat kredit tidak layak. Akibatnya, jika terjadi kesalahan analisis, akan sulit untuk menagih kredit yang diberikan karena macet dan berdampak negatif pada bank. Risiko ini muncul karena batas waktu pengembalian kredit, yang juga dikenal sebagai tenor, dapat memungkinkan gagal bayar atau tidak tertagih pembayaran kreditnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank

Istilah "Bank" berasal dari bahasa Latin, "*banco*" berarti bangku atau meja. Awalnya digunakan sebagai tempat penyimpanan emas dan berkembang menjadi surat tagih yang menyerupai uang kertas. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau cara lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kasmir (2016) menyatakan bahwa bank adalah bisnis di bidang keuangan, dengan kata lain kegiatan mereka terkait dengan sektor keuangan. Oleh karena itu, diskusi tentang bank tidak terbatas pada masalah keuangan. Fungsi bank dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai penerima kredit, di mana bank menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan seperti Tabungan, deposito, dan giro. Fungsi bank yang kedua bank sebagai pemberi kredit, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jika dilihat dari fungsinya, bank dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain pertama adalah Bank Sentral yang bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan mengawasi sektor perbankan nasional. Kedua adalah Bank Umum, bank yang menjalankan kegiatan secara konvensional atau syariah dan memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank yang operasionalnya terbatas, hanya menerima simpanan tertentu dan menyalurkan kredit. BPR tidak terlibat dalam lalu lintas pembayaran dan transaksi valuta asing, serta dilarang menjalankan usaha di luar ketentuan perbankan.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terbentuk dari tiga konsep utama: sistem, informasi, dan akuntansi. Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2021), sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terhubung untuk mencapai tujuan tertentu. Mulyadi (2016) menambahkan bahwa sistem adalah elemen-elemen yang bekerja sama menuju tujuan Bersama. Krismiaji (2015) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diorganisasi dan bermanfaat. Kata "informasi" berasal dari Bahasa Latin "*Informationem*", yang berarti garis besar atau pengetahuan yang dikomunikasikan. Menurut Romney dan Steinbart (2021), SIA

adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Krismiaji (2018) menyatakan bahwa SIA mengolah data transaksi untuk membantu perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan operasi bisnis. Tugas SIA meliputi: menghimpun dan memasukkan transaksi, mengelola dan menyimpan data, memberikan informasi melalui laporan atau akses data langsung, serta memonitor proses untuk memastikan validitas dan keandalan informasi. Krismiaji (2018) menyatakan bahwa komponen SIA terdiri dari: tujuan, masukan (input), keluaran (output), penyimpanan informasi, alat pemrosesan, pedoman dan prosedur, pengakses atau pengguna, serta proteksi dan pemantauan. Unsur-unsur SIA menurut Romney dan Steinbart (2021) meliputi: pengguna sistem, tata cara pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data, informasi Perusahaan, *software* pengolahan data, sarana teknologi pendukung (computer, jaringan) serta control internal untuk melindungi data. Keenam unsur ini mendukung tiga fungsi utama SIA yaitu: mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas bisnis, mengolah data menjadi informasi untuk pengelolaan dan evaluasi, serta melindungi data dan aset Perusahaan.

Kredit

Kredit berasal dari bahasa Latin "*Credere* atau *Credo*" yang berarti kepercayaan. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, kredit adalah pemberian uang berdasarkan kesepakatan, di mana penerima kredit wajib melunasi hutang berikut bunga dalam jangka waktu tertentu. Menurut Kasmir (2016), kredit melibatkan kontrak yang memuat hak, kewajiban, jangka waktu, bunga, serta sanksi bila debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani. Kasmir (2016) menuturkan bahwa prinsip-prinsip kredit terdiri dari 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*. Menurut Kasmir (2016), unsur-unsur kredit meliputi kepercayaan, kesepakatan, rentang waktu, risiko, dan rimbal balik atau imbalan. Kredit bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi bank, membantu kebutuhan usaha dan pribadi nasabah, serta mendukung kebijakan pemerintah seperti mendorong pengembangan UMKM. Fungsi kredit meliputi memaksimalkan manfaat uang, memperlancar peredaran uang dalam perekonomian, memaksimalkan fungsi barang, meningkatkan distribusi barang, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan semangat kerja penerima kredit, meningkatkan keseimbangan pendapatan, dan mempererat hubungan internasional melalui pinjaman antar negara.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Dalam sektor perbankan, istilah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) telah mengalami perubahan menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) seiring penerapan PSAK 55. PPAP disusun berdasarkan peraturan Bank Indonesia, sedangkan CKPN dibentuk berdasarkan evaluasi masing-masing bank terhadap kondisi debitur. Pada 1 Januari 2020, PSAK 55 digantikan oleh PSAK 71 yang mengacu pada *International Financial Reporting Standards* (IFRS), memperluas cakupan pencadangan kerugian penurunan nilai untuk semua kategori kredit, termasuk kredit lancar hingga macet. PSAK 71 juga mengubah metode penghitungan dan pelaporan kerugian piutang dalam laporan keuangan. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (2024) mewajibkan Bank Perkreditan Rakyat membentuk CKPN sesuai standar akuntansi terbaru dan menghitung Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) berdasarkan peraturan yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat ketahanan industri perbankan.

Penelitian Terdahulu

Raudatul Farihah, et al (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di Koperasi Rejeki Medan Jember saat memberikan pinjaman. Melalui wawancara dan

pengumpulan data, ditemukan bahwa kredit macet disebabkan oleh analisis jaminan yang kurang optimal, pendapatan nasabah yang tidak memadai, serta peran ganda karyawan. Walaupun SIA berfungsi dengan baik, prosedur pemberian pinjaman perlu diperbaiki untuk mencegah masalah di masa depan. Komponen penting SIA seperti sumber daya manusia, alat, catatan, laporan, formular, dan prosedur berperan dalam mengurangi risiko kesalahan dan memastikan kelancaran transaksi kredit.

Arnanda Reza Pramadani dan Dewita Puspawati (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab kredit bermasalah dari sudut pandang internal debitur di Himbara Cabang Surakarta pada periode 2017-2019. Faktor internal yang diidentifikasi meliputi penyimpangan proses kredit, itikad buruk pemilik dan pengelola, kegagalan sistem manajemen dan pengawasan kredit. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan 100 responden debitur bermasalah dari empat bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN), dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa kapasitas debitur berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah, sedangkan karakteristik, kondisi ekonomi, dan agunan tidak berpengaruh secara signifikan.

Ni Nyoman Trimita Wijayanti dan I Gusti Ayu Purnamawati (2022)

Penelitian ini membahas penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam proses pemberian kredit di LPD Seririt dan dampaknya terhadap pengurangan kredit macet. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui dokumentasi dan wawancara, ditemukan bahwa LPD Seririt telah menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) dalam Analisa kredit. Hasil penemitan menunjukkan bahwa penerapan SIA secara maksimal dapat menekan biaya pemberian kredit dan mengurangi risiko kredit macet SIA juga berperan penting dalam mendukung kelancaran program kredit dan operasional LPD sebagai lembaga keuangan desa.

Mei Nurlinda dan Hwihanus (2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja karyawan PT BPR Puridana Arthamas melalui audit operasional, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berupa pengumpulan data, tinjauan literatur, wawancara, dan kuesioner yang berfokus pada HRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) telah dijalankan sesuai tujuan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Namun, ditemukan kelemahan dalam fungsi perencanaan dan rekrutmen. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk menilai kembali kebutuhan tenaga kerja berdasarkan posisi atau kebutuhan lapangan guna menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan.

Dwi Ajeng Vianingsih dan Wilda Srimunawaroh Harahap (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan SIA terhadap pengelolaan piutang di Bank SUMUT KCP Perbaungan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat protokol khusus untuk menangani piutang tak tertagih, termasuk penghapusan entri dari laporan keuangan. Struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan yang jelas mendukung efektivitas pengelolaan piutang. Penerapan SIA terbukti memiliki dampak besar dalam mengurangi piutang tidak tertagih, sehingga semakin baik sistem akuntansi yang diterapkan, semakin kecil kemungkinan munculnya masalah kredit.

Rini Susiani, et al (2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi unsur independensi,

objektivitas, profesionalisme, akurasi, dan integritas dalam audit internal terhadap efektivitas proses pemberian kredit di kantor cabang Bank X Bandung. Menggunakan metode sampling jenuh dengan 30 responden dan analisis regresi linier berganda melalui SPSS Ver 25.0, hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, keahlian, ketelitian profesional, dan integritas auditor internal berperan penting dalam meningkatkan kualitas pemberian kredit. Auditor yang independen, objektif, terampil, dan berintegritas mampu memberikan rekomendasi yang tepat, menyusun laporan audit yang handal, serta memberikan nilai tambah bagi manajemen.

Isnı Maryatun Nur Jannah, et al (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan 11 fungsi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di PT BPR XYZ (PERSERODA) dan efektivitas pengelolaannya. Dengan metode deskriptif kualitatif dan seluruh staf (54 orang) sebagai populasi, data dikumpulkan melalui dokumentasi, kuesioner, dan wawancara, lalu dianalisis dalam empat tahap audit. Hasil penelitian menemukan beberapa masalah, seperti rencana kepegawaian yang tidak rinci, penilaian kinerja yang tertutup, tidak adanya evaluasi program pelatihan, pengembangan karier yang kurang optimal, serta minimnya perlindungan pegawai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan fungsi SDM untuk meningkatkan efektivitas operasional dan mencapai tujuan perusahaan secara optimal.

Danny Wibowo (2021)

Penelitian ini menyoroıti keberlanjutan bisnis keuangan bank konvensional, bank syariah, dan koperasi berdasarkan indikator sosio-budaya, keuntungan bisnis, serta lingkungan alam. Menggunakan metode deskriptif dan analisis konten dari berbagai sumber, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan bisnis bank konvensional di Indonesia masih sangat baik, didukung oleh tingginya keuntungan, potensi tabungan masyarakat, serta peningkatan aset dan kredit. Bank syariah tetap efisien dan hanya mengalami kontraksi kecil selama pandemi, dengan potensi pasar yang besar. Sebaliknya, koperasi menghadapi tantangan profitabilitas, terutama karena kurangnya minat dari generasi milenial terhadap koperasi.

Danny Wibowo (2023)

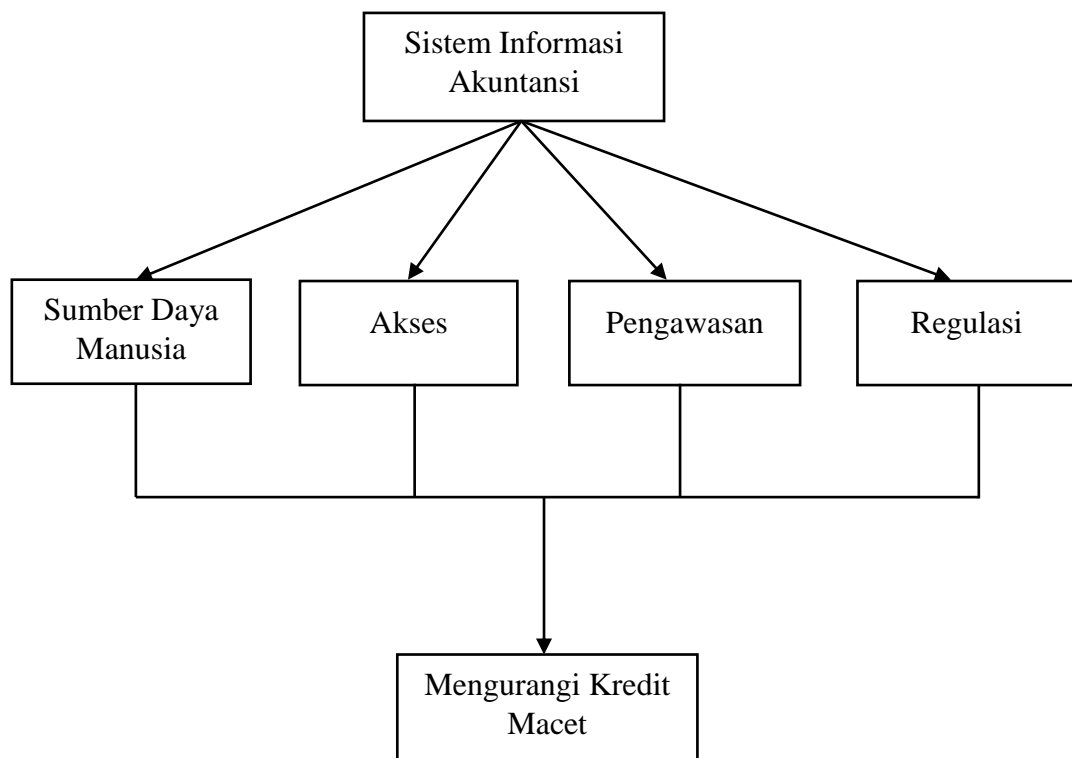
Penelitian ini menganalisis bagaimana kepercayaan dapat menjadi sumber risiko penipuan melalui pendekatan fenomenologis kualitatif berdasarkan konsep "fraud triangle" (tekanan, peluang, rasionalisasi). Studi kasus dilakukan pada sebuah bisnis di mana seorang manajer lokal menyalahgunakan kepercayaan pemilik bisnis, yang mengarah pada tindakan penipuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan tanpa pengawasan menciptakan peluang terjadinya penipuan. Setelah kasus terungkap, pemilik bisnis memperbaiki situasi dengan mengganti manajemen, memperkuat kontrol internal, dan menerapkan teknologi sederhana untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Pani Akhiruddin Siregar, at al (2023)

Penelitian ini menyelidiki pengaruh CKPN, DPK, dan NPF terhadap *Return On Assets* (ROA) sebagai ukuran profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Menggunakan metode purposive sampling dengan 65 data, penelitian ini menerapkan uji R², uji F, dan uji t untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CKPN, DPK, dan NPF berkontribusi terhadap 41% perubahan ROA, dengan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar model. Secara simultan dan parsial, ketiga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap ROA. Penelitian merekomendasikan perbankan syariah untuk menjaga tingkat CKPN dan NPF yang rendah guna meningkatkan profitabilitas.

Mustafid, at al (2024)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses dan mengevaluasi efektivitas sistem pemberian kredit di PT BPR Bumi Hayu Jember. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Proses pemberian kredit terdiri dari pengajuan kredit, analisis kelayakan, verifikasi dan persetujuan, hingga pencairan dana. Efektivitas sistem didukung oleh prosedur yang terstruktur, optimalisasi fungsi internal, dan pencatatan administrasi yang sesuai standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit yang diberikan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya guna uang, stabilisasi peredaran uang, serta mendorong kewirausahaan dan pemerataan pendapatan. Dengan sistem yang baik, PT BPR Bumi Hayu mampu menjalankan pemberian kredit secara optimal dan berdampak positif terhadap perekonomian lokal.

Rerangka Pemikiran

Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk memahami dinamika Perusahaan dan menganalisis sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan pemberian kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta pengumpulan informasi dari lokasi penelitian, jurnal, dan internet. Penelitian ini menilai efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi dalam proses pemberian kredit di PT BPR Guna Yatra yang berlokasi di Komplek Ruko Kebon Rojo Indah, Jalan Kebon Rojo No. 8, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada temuan di lapangan dan lokasi penelitian. Pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu observasi (mengamati langsung kejadian yang menjadi fokus penelitian), wawancara (pertemuan antara dua individu untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab guna membentuk pemahaman terhadap kejadian yang sedang diteliti), dan dokumentasi (mengumpulkan catatan peristiwa yang telah terjadi dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya lain untuk melengkapi observasi dan wawancara).

Satuan Kajian

Satuan kajian adalah istilah untuk menjelaskan bidang generalisasi yang melibatkan subjek atau objek dengan kualitas dan aspek tertentu yang sudah ditentukan peneliti untuk ditelaah dan disimpulkan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan memberikan penjelasan terhadap data atau informasi yang dikumpulkan. Subjek penelitian ini adalah pemberian kredit, sedangkan objeknya adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra.

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan pendekatan penafsiran data dari berbagai sumber, seperti dokumentasi dan wawancara. Adapun alur analisis yang digunakan meliputi: pengumpulan data (data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi), reduksi data (data yang diperoleh diringkas dan dipilih mana informasi yang penting untuk penelitian, sementara informasi yang tidak relevan dihilangkan), penyajian data (data yang telah direduksi disusun dengan cermat agar mudah dipahami dan dianalisis), dan penarikan Kesimpulan (pada tahap akhir, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Guna Yatra berlokasi di Komplek Ruko Kebon Rojo Indah, Jl. Kebon Rojo No. 8, Surabaya. Didirikan pada tahun 1973 dengan nama awal PT Bank Pasar Guna Yatra, kemudian berganti nama menjadi PT BPR Guna Yatra pada tahun 1988. Bank ini berperan sebagai lembaga keuangan yang andal, tepercaya, aman, dan menguntungkan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur. Produk yang ditawarkan meliputi tabungan, deposito berjangka, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit investasi, dan kredit multiguna. Pada tahun 2017, terjadi perubahan kepemilikan saham dan peningkatan permodalan berdasarkan persetujuan OJK nomor SR-137/KR.041/2017 tanggal 6 September 2017.

Struktur organisasi di PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra berfungsi sebagai pedoman pembagian tugas dan wewenang kepada setiap karyawan. Dengan struktur ini, tugas, tanggung jawab, dan alur pertanggungjawaban menjadi jelas, sehingga seluruh fungsi dan karyawan dapat berkolaborasi secara harmonis. Penerapan struktur organisasi yang baik bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan secara lebih efektif dan efisien.

Sistem Informasi Akuntansi (Aplikasi yang Digunakan)

Untuk meningkatkan kinerja perbankan, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Guna Yatra memanfaatkan teknologi E-KTP Reader dalam proses identifikasi identitas nasabah melalui verifikasi data di Dinas Kependudukan. Selain itu, PT BPR Guna Yatra bekerja sama dengan PT Inti Sistem Sarana Sejahtera (PT IS3) dalam penggunaan Sistem Informasi Perbankan Terpadu (SIPT), yaitu *software core banking system* berbasis aplikasi desktop, guna

mendukung operasional bank secara lebih efisien. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Dwi sebagai Kepala Accounting dan Pelaksana SIPT dibawah ini:

“Iya, kami menggunakannya. Dalam proses identifikasi debitur kami menggunakan pengecekan kartu identitas penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan, dengan nama E-KTP Reader. Kemudian dalam pencatatan dan pembukuan kredit kami menggunakan Core Banking System dengan nama Sistem Informasi Perbankan Terpadu (SIPT). Hal ini kami bekerja sama dengan PT Inti Sistem Sarana Sejahtera (PT IS 3).”

Sumber Daya Manusia (SDM)

Penelitian menunjukkan bahwa karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra memegang peranan penting sesuai bidang keahliannya. Setiap karyawan minimal berpendidikan D3 dan memiliki pengalaman kerja di bidang masing-masing. Contohnya, karyawan kasir harus memiliki pengalaman minimal satu tahun, sedangkan karyawan di bagian hukum harus berlatar belakang pendidikan hukum dan memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun di bidang tersebut. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Zulkfli sebagai Direktur Operasional yaitu:

“Tingkat pendidikan SDM adalah paling sedikit D3. Setiap unit/bagian diisi dengan SDM yang berpengalaman dibidang masing-masing. Contoh bagian kasir adalah karyawan yang memiliki pengalaman dibidangnya minimal 1 tahun. Bagian legal adalah karyawan dengan lulusan dibidang hukum dengan pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya. Memang ada beberapa karyawan yang tidak sesuai bidang pendidikannya namun dinilai mampu untuk mengerjakan jobdesk yang diberikan, tentunya dengan beberapa pertimbangan dan tes saat proses penerimaan karyawan.”

Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit

Alat yang digunakan

Penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra menggunakan komputer yang dilengkapi dengan E-KTP Reader untuk identifikasi debitur, serta Core Banking System (Sistem Informasi Perbankan Terpadu/SIPT) untuk pencatatan dan pembukuan kredit. Penggunaan teknologi ini membantu menghasilkan informasi yang akurat dan mempercepat pelayanan kepada nasabah. Kondisi sarana dan prasarana yang baik juga mendukung kelancaran operasional, sedangkan kerusakan fasilitas dapat menghambat proses bisnis.

Catatan

Hasil studi menunjukkan bahwa seluruh pencatatan dan pembukuan transaksi di PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra dilakukan menggunakan Core Banking System SIPT. Sistem ini digunakan mulai dari pencatatan jurnal pengeluaran kas, pengelolaan buku besar, penyusunan neraca, laporan laba rugi, analisis rasio keuangan, hingga jurnal transaksi lainnya, semuanya disusun sesuai Pedoman Akuntansi BPR. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dwi yaitu:

“Tentu ada. Semua pencatatan dan pembukuan setiap transaksi dilakukan dengan menggunakan Core Banking System SIPT. Pencatatan pembukuan dilakukan sampai menghasilkan laporan keuangan perbankan sesuai aturan pedoman akuntansi BPR. Proses akuntansi dimulai dari pencatatan jurnal pengeluaran kas, dilanjutkan dengan buku besar, serta penyusunan neraca dan laporan laba rugi. Selain itu, analisis rasio keuangan juga menjadi bagian penting. Semua transaksi yang dicatat merupakan kejadian yang terjadi dalam periode akuntansi yang relevan.”

Laporan

Laporan keuangan yang diperoleh dari PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra meliputi jurnal transaksi, buku besar, neraca, laporan laba rugi, rasio keuangan, daftar tunggakan, angsuran debitur, jadwal pembayaran angsuran, dan daftar nominatif debitur yang berisi data

lengkap debitur. Laporan publikasi, seperti laporan tata kelola, posisi keuangan, laba rugi, kualitas aset produktif, komitmen kontinjensi, dan informasi lainnya, tersedia di website resmi PT BPR Guna Yatra (www.gunayatra.com) untuk kepentingan para stakeholder. Hal ini diungkapkan oleh ibu Dwi dalam wawancara berikut:

“Laporan yang dihasilkan antara lain daftar nominatif debitur yang memuat nama debitur, alamat, jumlah limit, sisa pinjaman, tanggal mulai jatuh tempo kredit, jumlah angsuran pokok dan angsuran bunga, kualitas kredit dan jumlah tunggakan. Kemudian ada jadwal angsuran serta laporan keuangan perbankan. Untuk laporan keuangan perbankan berisi laporan neraca, laporan laba rugi, rasio keuangan dan lain-lain yang dapat dilihat oleh stakeholders yang membutuhkan di website kami, www.gunayatra.com.”

Formulir dan Dokumen Kredit yang Digunakan

Penelitian menemukan bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra menggunakan berbagai formulir dalam proses pemberian kredit. Formulir tersebut meliputi formulir pengajuan pinjaman, surat permohonan pinjaman, surat pernyataan calon peminjam, formulir persetujuan kredit, formulir penilaian jaminan, dan formulir pendukung lainnya. Temuan ini diperkuat melalui wawancara dengan Bapak Angga, Staff Pembukuan dan Pelaksana SIPT:

“Formulir yang kami gunakan mencakup beberapa dokumen penting, antara lain formulir pengajuan pinjaman, formulir data diri calon debitur, surat permohonan pinjaman, surat pernyataan dari calon debitur, formulir pencairan pinjaman, formulir laporan penilaian pinjaman, formulir persetujuan kredit, serta formulir pendukung lainnya.”

Prosedur

Penelitian di PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit melalui sistem informasi akuntansi melibatkan beberapa tahapan: pertama pengajuan kredit: calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan melampirkan dokumen persyaratan seperti formulir kredit, KTP, KK, bukti pembayaran tagihan (listrik, telepon, air, PBB), rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, dan NPWP (untuk limit di atas Rp50 juta). Kedua verifikasi berkas: pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, keaslian data keuangan, kelayakan usaha atau penghasilan, serta nilai agunan. Ketiga analisis keuangan dan jaminan: Evaluasi terhadap kondisi keuangan debitur dan nilai jaminan yang diajukan. Keempat survey lapangan: kunjungan ke tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kerja debitur. Kelima penandatanganan akad kredit: jika semua tahapan lolos, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit. Temuan ini didukung dari hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli yang mengatakan:

“Menurut saya prosedur yang kami terapkan sudah efektif dan berjalan dengan baik. Untuk prosedur SIA diawali dengan calon debitur mengajukan permohonan pinjaman/kredit dengan kelengkapan dokumen yang telah disyaratkan seperti formulir permohonan kredit, KTP debitur, kartu keluarga, bukti pembayaran Listrik terakhir, bukti pembayaran telepon terakhir, bukti pembayaran air terakhir, bukti pembayaran PBB terakhir, rekening koran/tabungan 3 (tiga) bulan terakhir dan NPWP jika limit kredit lebih dari Rp50 juta. Kemudian verifikasi berkas dan identitas calon debitur. Jika sudah terpenuhi maka dilakukan analisa data keuangan dan data jaminan, dilakukan survey lapangan terkait tempat tinggal, usaha, atau tempat kerja debitur. Jika sudah sesuai semua dan mendapat persetujuan maka dilakukan penandatanganan akad perjanjian kredit.”

Berdasarkan penelitian, PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra menetapkan bahwa siapa pun dapat mengajukan pinjaman, dengan prioritas bagi pemilik usaha minimal berjalan 2 tahun atau karyawan dengan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan pokok dan pembayaran angsuran. Persyaratan umum calon debitur perorangan adalah Warga Negara Indonesia (WNI), sudah dewasa dan memiliki KTP serta memiliki penghasilan tetap (pegawai/karyawan), penghasilan tidak tetap (wirausaha/pedagang), atau profesi tertentu (akuntan, dokter, notaris, dll). Jika merupakan badan usaha, maka syaratnya: berlokasi di

Indonesia, berbentuk badan hukum (PT, koperasi, yayasan) atau non-badan hukum (CV, firma) dan kegiatan bisnis tidak termasuk aktivitas yang dilarang dalam pembiayaan. Temuan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Angga yang mengatakan:

“Semua orang bisa mengajukan pinjaman. Diprioritaskan yang memiliki usaha minimal 2 tahun atau karyawan dengan gaji yang bisa mengcover kebutuhan pokok dan membayar angsuran yang ada. Persyaratan umum jika calon debitur adalah perorangan maka harus WNI, memiliki KTP dan dewasa, memiliki penghasilan tetap seperti karyawan dan pegawai, penghasilan tidak tetap seperti wirasaha, pedagang, akuntan, dokter, dan lain sebagainya. Jika calon debitur adalah badan usaha maka ketentuannya adalah usaha berdomisili di Indonesia, berbentuk badan hukum ataupun non badan hukum, sektor ekonomi, kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam aktivitas pembiayaan yang dilarang.”

Dalam proses pemberian persetujuan kredit, manajemen PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku. Langkah-langkah analisa dan evaluasi kredit yang dilakukan adalah dengan analisis kebutuhan debitur (menilai kebutuhan calon debitur terkait jenis fasilitas kredit, jumlah dana yang diperlukan, jangka waktu kredit, dan kondisi keuangan) dan penilaian kemampuan pembayaran (*Repayment Capacity*) yaitu pemberian kredit hanya dilakukan jika terdapat keyakinan atas kemampuan calon debitur untuk membayar kembali pinjaman, baik dari penghasilan tetap maupun hasil usaha yang dibiayai. Adapun analisa tambahan meliputi: analisa risiko (mengkaji potensi risiko dari calon debitur), analisa SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dengan mengecek riwayat kredit calon debitur, analisa Keuangan (meliputi pemeriksaan rekening koran dan laporan keuangan calon debitur, dan analisa kebutuhan dana (memastikan kesesuaian antara dana yang diminta dengan kebutuhan sebenarnya). Hasil penelitian diatas juga merupakan hasil temuan dari wawancara dengan bapak Zulkifli yang mengatakan:

“Semua proses perkreditan diatur dalam kebijakan dan prosedur, menurut SOP analisa dan evaluasi kredit adalah proses pemberian kredit harus dilakukan berdasarkan analisa dan evaluasi secara mendalam mengenai kebutuhan debitur yang meliputi jenis fasilitas, jumlah dana dan jangka waktu kredit serta kondisi keuangan. Kemudian pemberian kredit harus didasarkan pada keyakinan atas kemampuan pembayaran, dengan demikian harus mempertimbangkan proyeksi kemampuan pembayaran yang dihasilkan oleh debitur dari kegiatan usaha yang dibiayai atau penghasilan tetap sesuai dengan jenis kreditnya. Selain itu, ada analisa resiko, analisa SLIK, analisa keuangan berupa rekening koran dan laporan keuangan serta analisa kebutuhan dana.”

Pendapatan utama PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra berasal dari aset produktif, yaitu pendapatan bunga kredit. Untuk memastikan BPR tetap menghasilkan keuntungan yang optimal, suku bunga kredit harus dihitung secara cermat. Penetapan suku bunga kredit diatur berdasarkan kebijakan internal bank, menggunakan Suku Bunga Dasar Kredit (*Base Lending Rate/BLR*) di mana BLR dihitung setiap bulan dan perhitungan dilakukan menggunakan metode bunga Flat. Penetapan BLR dan perhitungan suku bunga dilakukan mengacu pada rencana bisnis dan prosedur kredit yang telah ditetapkan. Dengan digunakannya BLR (*Base Lending Rate*) ini diharapkan dapat mencegah BPR dari kerugian serta memastikan keuntungan yang optimal. Bunga dihitung dengan metode *Flat* dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Nominal Plafon Kredit x Bunga Kredit x Jumlah Hari
360 hari

Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Dwi yang mengatakan bahwa:

“Perhitungan bunga di PT BPR Guna Yatra berdasarkan suku bunga dasar bank yang dihitung berdasarkan Base Lending Rate (BLR) bank setiap bulannya dengan cara perhitungan bunga Flat, yang tentunya berbeda untuk masing- masing kategori. Misalnya bunga untuk debitur karyawan dan

seorang yang memiliki suatu usaha, hal ini mengacu pada kebijakan dan prosedur kredit yang dimiliki oleh BPR. Dimana perhitungan bunga Flat ini sesuai dengan skema bisnis yang dijalankan oleh BPR pada umumnya."

PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra melakukan pemantauan pembayaran kredit melalui Account Officer (AO) yang bertugas mengingatkan debitur mengenai jadwal jatuh tempo dan jumlah tunggakan, menggunakan media seperti telepon, SMS, WhatsApp, dan surat. Jika debitur mengalami kerugian akibat transaksi perbankan, mereka dapat mengajukan pengaduan sesuai prosedur yang berlaku di BPR. Hal diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Angga yang mengatakan:

"Tentu saja kami memanfaatkannya. Setiap account officer (AO) bertanggung jawab untuk menjaga hubungannya dengan debitur masing-masing, termasuk memastikan bahwa pembayaran angsuran dapat dilakukan tepat waktu. Oleh karena itu, setiap AO secara rutin memberikan informasi mengenai pembayaran dan jumlah tunggakan, jika ada, kepada debitur melalui berbagai media komunikasi yang ada, seperti: melalui telepon, Whatsapp, atau surat tertulis."

Kendala pasti akan muncul saat menerapkan sistem informasi akuntansi pada perkreditan bank, tak terkecuali di PT BPR Guna Yatra entah karena faktor eksternal maupun internal. Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Zulkifli, beliau mengatakan:

"Tentu pernah. Ada nasabah yang gagal bayar atau kredit macet Dimana setelah dilakukan proses audit, pengecekan dokumen kembali hingga berbicara langsung antara pihak kami (bank) dengan nasabah, dan ditemukan bahwa terjadinya kredit macet dikarenakan faktor eksternal berupa menurunnya penghasilan nasabah baik yang bekerja sebagai karyawan ataupun pemilik suatu usaha. Penurunan penghasilan ini makin parah saat masa pandemi covid-19 yang terjadi kemarin."

Bapak Zulkifli juga mengungkapkan terkait jika terjadi gagal bayar atau kredit macet:

"Jika telah terjadi kredit macet, maka kami harus berupaya untuk menemukan solusi yang baik sehingga tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Dalam hal ini yang dilakukan adalah dengan menerapkan perencanaan sendiri tanpa melanggar aturan yang berlaku serta disusun dalam standar operasional perusahaan. Cara yang dilakukan jika kredit macet terjadi adalah segera diurus dan diselesaikan, salah satunya adalah dengan memberikan peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, restrukturisasi kredit macet, sampai dilakukan lelang aset yang dijamin. Dengan dilakukan restrukturisasi kredit ini diharapkan dapat menggerakkan nasabah untuk membayar kreditnya. PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra tidak langsung mengambil alih atas hak jaminan debitur untuk dilelang apabila terjadi kredit macet, melainkan melakukan pendekatan atau pembinaan secara kekeluargaan, negosiasi dan mengarahkan nasabah agar membayar kreditnya."

Hasil wawancara menunjukkan adanya kredit macet disebabkan faktor eksternal, seperti penurunan penghasilan nasabah, terutama saat pandemi COVID-19. Restrukturisasi kredit hanya dilakukan jika nasabah mengalami kesulitan membayar dan dinilai masih memiliki prospek usaha yang baik. Bank lebih mengutamakan pembinaan, pendekatan, dan negosiasi agar nasabah dapat kembali memenuhi kewajibannya.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra masih menerapkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam operasionalnya. Meskipun demikian, mulai 1 Januari 2025, bank ini akan beralih ke penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan simpanan cadangan atas risiko kerugian piutang tak tertagih yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan BPR. Semakin tinggi tingkat kredit macet, semakin besar pula PPAP/CKPN yang harus disediakan, sehingga meningkatkan biaya operasional. PT

Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra menetapkan kebijakan PPAP berdasarkan ketentuan perbankan, yakni: 0,5% untuk aktiva produktif berkualitas lancar, 10% untuk aktiva kurang lancar (setelah nilai agunan dikurangi), 50% untuk aktiva diragukan (setelah nilai agunan dikurangi), 100% untuk aktiva macet (setelah nilai agunan dikurangi). Penilaian kualitas kredit mengacu pada POJK Nomor 40/POJK.03/2019, dengan kategori: lancar (pembayaran tepat waktu, dalam perhatian khusus (tunggalan sampai 90 hari), kurang lancar (tunggalan 91-120 hari), diragukan (tunggalan 121-180 hari), dan macet (tunggalan lebih dari 180 hari). Penentuan tingkat kolektibilitas ini menjadi dasar dalam manajemen risiko kredit di BPR. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Zulkifli yang mengatakan:

“Saat ini PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra masih menerapkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) karena pengimplementasikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) baru akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ini berfungsi sebagai cadangan untuk menanggulangi kerugian akibat piutang yang tak tertagih benar-benar tidak dapat ditagih lagi, yang tentunya akan berdampak pada kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebagai contoh, biaya yang harus disisihkan untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) / Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) meningkat seiring dengan jumlah kredit yang macet. Ini dapat menyebabkan biaya operasional yang tinggi dan merugikan perusahaan. Saat ini, PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra terus menerapkan kebijakan penetapan presentase untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Sesuai dengan peraturan perbankan, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum ditetapkan sebesar 0.5% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) khusus ditentukan sebesar 10% dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, 50% dari aktiva produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan, serta 100% dari aktiva produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.”

Pembahasan

PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra merupakan lembaga keuangan yang berfokus pada layanan kredit bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Produk kredit yang ditawarkan meliputi kredit usaha, kredit konsumtif, dan kredit investasi. Struktur organisasinya mencakup divisi kredit, keuangan, operasional, dan pengawasan yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung proses penyaluran kredit. Proses pemberian kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra meliputi tahapan:

- Pengajuan Kredit
- Analisis Kelayakan
- Persetujuan Kredit
- Pencairan Dana
- Pemantauan Kredit

Bank telah mengimplementasikan Sistem Informasi Akuntansi untuk mencatat transaksi kredit, memantau pembayaran, serta mengelola data nasabah secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Temuan Penelitian:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Kompetensi SDM berperan penting dalam analisis kelayakan kredit.
 - Bank telah melakukan pelatihan rutin, namun masih terdapat keterbatasan jumlah analisis kredit untuk menangani volume pengajuan yang tinggi.
2. Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit
 - Alat: Sistem komputerisasi sudah digunakan, namun integrasi data perlu ditingkatkan.

- Catatan dan Laporan: Setiap transaksi kredit dicatat dan disusun dalam laporan keuangan berkala untuk evaluasi risiko kredit.
- Formulir dan Dokumen Kredit: Prosedur dokumentasi ketat diterapkan, sesuai prinsip kehati-hatian OJK.
- Prosedur Pemberian Kredit: Tahapan prosedur sudah berjalan efektif, meskipun perlu peningkatan kecepatan dalam analisis kredit.
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN): Bank telah membentuk cadangan berdasarkan analisis risiko, namun evaluasi berkala tetap diperlukan untuk menjaga kecukupan dana cadangan.

Dapat disimpulkan sistem pemberian kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam peningkatan sistem informasi akuntansi dan efisiensi proses analisis kredit. Dengan menerapkan teori yang relevan, bank dapat mengoptimalkan manajemen risiko dan meningkatkan efektivitas pemberian kredit guna mendukung pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam pemberian kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra berjalan dengan cukup baik. Sumber daya manusia telah ditempatkan sesuai bidang keahlian, meskipun pada beberapa bagian masih terdapat ketidaksesuaian tingkat keterampilan. Teknologi yang digunakan sudah modern dengan pemanfaatan aplikasi SIPT. Pencatatan akuntansi kredit dilakukan lengkap melalui jurnal umum, jurnal kas, buku besar, hingga laporan keuangan. Prosedur dokumentasi kredit telah sesuai dengan standar, memudahkan proses pengajuan. Laporan keuangan disusun akurat dan dapat diakses stakeholder. Prosedur pemberian kredit juga mengikuti kebijakan yang berlaku, termasuk mekanisme restrukturisasi kredit macet tanpa pengambiln jaminan secara paksa.

Keterbatasan

Penelitian ini terbatas pada individualitas yang dimiliki oleh peneliti. Hal ini ditentukan oleh pemahaman peneliti terhadap makna yang tersembunyi. Ketika wawancara sehingga kecenderungan untuk bias tidak dapat dihindari sepenuhnya. Agar bias dapat diminimalkan, dilakukan metode berupa wawancara mendalam dan observasi. Selain itu, karena informan cukup sibuk dengan beberapa pekerjaan mereka saat ini, peneliti memiliki waktu yang terbatas untuk melaksanakan wawancara.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran dari peneliti diantaranya: (1) bagi PT Bank Perkreditan Rakyat Guna Yatra, diharapkan untuk menerapkan *job rotation* di seluruh divisi guna mencegah kejenuhan dan potensi kecurangan karyawan. Selain itu, sistem, alat, dan prosedur yang sudah ada perlu terus dijaga dan ditingkatkan untuk memaksimalkan kinerja, (2) bagi peneliti berikutnya, diharapkan memperluas kajian ke lebih banyak BPR dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, agar hasilnya lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M., Mashudi, U., Hidayatuallah, A. M., & Maulana, M. A. (2024). *Analisa Alur Pemberian Kredit Kepada Nasabah Di PT. BPR Bumi Hayu Jember*. Jember: Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. doi: <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.323>
- Carl S. Warren, dkk. (2014). *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dermawan, Indra. (2005). *Pengantar Keuangan dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Farihah, R., Moh. Halim, A. S. Nastiti. (2021, Januari - Juni). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit. *Journal of Business, Management and Accounting*, Volume 2, No. 2. doi:<https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i2.1746>
- Herli, Ali Suyatno. (2013). *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang No.10 1998 Tentang Perbankan*. Jakarta: Lembaga Keuangan.
- Indonesia. (1999). *Undang-undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*. Jakarta: Lembaga Keuangan.
- Indonesia. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat*. Jakarta: Perbankan, BPR.
- Jannah, I. M. N., T. D. Karyanti dan A. Widiarto. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Audit Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia Pada PT BPR XYZ (PERSERODA). *Yudhistira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, Volume 2, No. 3, 379-395. doi:Doi : 10.53363/yud.v2i3.52
- Kasmir, D. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/Penulis Dr. Kasmir (17 ed.)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kosasih, R. (1992). *Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan / Barry E. Cushing; diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih*. Jakarta: Erlangga.
- Krismiaji. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Nurlinda, M., & Hwihanus. (2024). Audit Operasional Pada PT BPR Puridana Arthamas Untuk Mengetahui Efektivitas Dan Kinerja Karyawan. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Volume 4, No. 2, Hal. 79-93. doi:<https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i2.1178>
- Pramadani, R. M., D. Puspawati, S.E., Ak., M.Sc. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Internal Debitur Pada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) Cabang Surakarta Periode 2017-2019. *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, ISBN. 978-979-1230-72-8.
- Ratnasari, E. (2024, Maret). Analisis Pemberian Kredit Pada PT Bank Panin Tbk. Cabang Sintang. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, Vol 22 No. 1.

- Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi Accounting Information Systems*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Saputri, M. D., & Fernos, J. (2022). *Analisis Pemberian Kredit Pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Muko-Muko*. doi:10.31219/osf.io/cqnpa
- Siregar, P. A., Suginam, Harahap, N., & Hastuti, O. (2023, November). Menganalisis Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol. 5 No.2, Pages 307-316. doi:DOI 10.47065/ekuitas.v5i2.4494
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susiani, R., R. Fitriana dan Syafdinal. (2024). Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Volume 8, No. 2, 1228-1237. doi:https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1975
- Vianingsih, D. A., & Harahap, W. S. (2022). Analisis Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi Piutang Tak Tertagih dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Sumut KCP Perbaungan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2 No. 10, 3247-3252.
- Wibowo, D. (2021). Analysis of Financial Business Sustainability Study on Convention Banks, Islamic Banks and Coop. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, Volume 4, No. 2, Page: 1953-1964. doi: https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1882
- Wibowo, D. (2021). Expectation GAP in Surabaya: The Assessment Between Auditors With Audit Report Users. *Indonesian Journal of Social Science Research*, Volume 2, No. 1, 1-9. doi:http://dx.doi.org/10.11594/ijssr.02.01.01
- Wibowo, D. (2023). The Awakening of Post-Fraud Enthusiasm. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2), Page: 395-405. doi:10.21532/apfjournal.v8i2.305
- Wijayanti, N. N., & Purnamawati, I. G. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pemberian Kredit Untuk Menekan Angka Kredit Macet Pada LPD Seririt. *Jurnal Akuntansi Profesi*, Volume 13, No 3, 671-680. doi:http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2